

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara geografis, Nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Sebagai suatu sistem masyarakat nelayan terdiri atas kategori- kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Faktor kebudayaan ini menjadi pembeda masyarakat dari kelompok sosial lainnya. Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung maupun tidak langsung, menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumberdaya perikanan. Mereka menjadi komponen utama konstruksi masyarakat maritim Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan banyaknya jumlah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan di daerah pesisir pantai.

Sebagai Negara yang dikelilingi oleh laut, hampir semua provinsi di Indonesia memiliki perairan laut, artinya pasti ada daerah pesisir yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan. Gampong Ujong Blang kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe, merupakan salah satu gampong yang berada di wilayah pesisir kota Lhokseumawe, yang kebanyakan masyarakatnya adalah nelayan yaitu dengan menjadikan hasil laut sebagai sumber pendapatan. Potensi Gampong Ujong Blang ditetapkan sebagai desa nelayan karena memiliki potensi yang sangat besar, jadi ketetapan tersebut karena secara geografis dan keseharian kehidupan masyarakat sangat tergantung dari hasil perikanan laut.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMENKP/2016 Tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasal 14 bahwa pembinaan meliputi : pemberian pedoman, fasilitas penyuluhan atau pendamping, peralatan dan bimbingan teknis.

Konsep pembinaan masyarakat nelayan dalam kerangka perspektif pembangunan perikanan yang berkelanjutan di Indonesia perlu dikaji secara baik, tepat dan menyentuh sasaran yang ingin dicapai. proses pembinaan yang berlangsung harus dilakukan secara terus menerus dan simultan dengan masyarakat nelayan sehingga menimbulkan perubahan-perubahan yang sesuai dengan tujuan pembangunan perikanan yang diharapkan. Pembinaan nelayan pesisir merupakan pengembangan masyarakat nelayan agar dapat mandiri dan berdaya untuk bisa mengelola wilayah pesisirnya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan bahwa selama ini belum ada strategi khusus dalam konteks penanganan pembinaan nelayan pesisir di kota Lhokseumawe khususnya di gampong Ujong Blang . (wawamcara : Alamsyah S.st.pi selaku Kasi bidang kelautan di Dinas kelautan dan perikanan). Dari Informasi tadi dapat diketahui berarti selama ini pembinaan nelayan tidak dilakukan secara sistematis, tidak ada strategi memang ada kaitan-kaitan program yang dilakukan oleh pemerintah seperti pembagian boat, alat tangkap namun itu tidak bermuara pada satu perencanaan yang matang sehingga setelah selesai program selesai dan tidak bisa diukur.

Berdasarkan Observasi awal yang peneliti lakukan, diperoleh data bahwa Gampong Ujong Blang memiliki sumber daya yang besar dalam hal perikanan laut sebagian besar masyarakat gampong Ujong Blang berprofesi sebagai nelayan. Dengan jumlah penduduk 4.585 Jiwa yang bekerja sebagai nelayan kurang lebih 673 jiwa. Jenis Boat yang digunakan Nelayan kampong ujong blang cukup beragam diantaranya Boat langga berukuran besar 5- 12 gross tonnage (GT) 30 unit lebih kurang, Boat pancing 200 unit, perahu yang tidak memakai mesin jenis ini ada 4 unit.(observasi awal : Abdullah selaku panglima laot).

Sebagian besar, Nelayan ujong blang menggunakan Boat pancing yang dikategorikan sebagai nelayan tradisional dan pola pengembangan usaha perikanan masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Berbagai permasalahan yang mereka hadapai seperti lemahnya manajemen usaha, dan ketika meminta bantuan dari pemerintah tidak adanya organisasi yang memudahkan dalam mendapatkan bantuan. Bantuan yang mereka dapatkan hanya sebagian nelayan yang mempunyai relasi dengan pihak pemerintahan. Masyarakat pun mengeluh dikarenakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah selama ini untuk Nelayan berupa boat dan puka jaring belum merata, dan selama ini pemerintah juga belum pernah memberikan pembinaan kepada masyarakat nelayan di ujong blang dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan selama ini masyarakat gampong ujong blang belum adanya koperasi nelayan ataupun organisasi nelayan yang seharusnya memang diperlukan guna meningkatkan kesejahteraan seperti dana simpan pinjam menolong satu sama lain. masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat pesisir adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti penting dan nilai

strategis sumberdaya kelautan dan perikanan bagi pembangunan ekonomi daerah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah karena tingkat pendidikan yang rendah, tingkat pendidikan mereka pada umumnya hanya lulusan sd atau tidak tamat sekolah dasar.

Berdasarkan pemaparan di atas, pembinaan sangat dibutuhkan guna menunjang tingkat kesadaran masyarakat nelayan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat nelayan. pembinaan merupakan suatu sistim pendidikan non formal, yang berupaya mengubah perilaku sasarnya melalui penyuluhan dan pendidikan yang terus menerus kepada masyarakat setempat. Pembinaan masyarakat dapat dilihat dari beragam pendekatan, sehingga dapat memahami pokok-pokok pikiran tentang pembinaan tersebut. pembinaan masyarakat nelayan yang merupakan bagian dari pembangunan perikanan yang berkelanjutan di Indonesia yang dapat menumbuhkan serta meningkatkan partisipasi masyarakat nelayan dalam pengelolaan wilayah pesisir guna terjadinya perubahan perilaku yaitu pengetahuan, sikap dan ketrampilan di kalangan masyarakat nelayan agar mereka tau, mau dan mampu melaksanakan perubahan-perubahan dalam pengelolaan wilayah pesisir demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat nelayan yang ingin dicapai melalui pembangunan perikanan. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan mengenai bagaimana Strategi Pemerintah dalam Pembinaan Nelayan Pesisir yang harus ditempuh untuk dapat memberdayakan sosial ekonomi masyarakat nelayan di Gampong Ujong Blang sehingga kesejahteraan masyarakat nelayan di Gampong Ujong Blang khususnya menjadi semakin lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Strategi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Pembinaan Nelayan Pesisir di Gampong Ujong Blang?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka fokus pada penelitian ini adalah mengkaji : Strategi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Pembinaan Nelayan Pesisir di Gampong Ujong Blang yang meliputi : tindakan, proses, perencanaan terkaid dengan strategi umum dan khusus kota lhokseumawe.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Strategi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Pembinaan Nelayan Pesisir di Gampong Ujong Blang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Strategi Pemerintah Kota Lhokseumawedalam Pembinaan Nelayan Pesisir di Gampong Ujong Blang.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kepentingan teoritis dan praktis, khususnya dalam membina nelayan pesisir.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat atau berguna untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang disiplin Ilmu Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan bahan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam pengambilan suatu kebijakan atau keputusan terkait pembinaan nelayan pesisir, serta dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Mursidah (2016), dengan judul “pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan “ , dengan hasil penelitian bahwa Setiap masyarakat pusong yang ingin mendapatkan bantuan harus mengajukan permohonan permohonan atau pembuatan proposal atas nama kelompok terlebih dahulu, dengan memenuhi persyaratan dengan melampirkan berkas- berkas. Hasil bantuan yang diberikan berupa barang bukan berupa finansial. Dengan adanya bantuan tersebut mampu meningkatkan nilai ekonomi masyarakat pusong walaupun bukan masyarakat pusong yang mendapatkan bantuan yang berdaya, karena penerimaan bantuan menjual bang bantuan kepada yang lebih bermodal sehingga yang berkuasa makin berkuasa dan yang miskin tetap miskin. Kendala DKPP dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat pusong adalah : 1). Masyarakat pusong yang tidak memanfaatkan barang bantuan, melainkan barang yang diberikan dijual dengan harga yang terbilang murah. 2). Kurang pengawasan dari pihak pemerintah membuat masyarakat leluasa melakukan aksi jual beli barang bantuan yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Hal ini terjadi karena DKPP tidak memiliki tim khusus dalam hal pengawasan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Mursidah (2016)memfokuskan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di wilayah Pusong kota Lhokseumawe. Sementara peneliti

menfokuskan kepada Strategi Pemerintah dalam Pembinaan Nelayan penelitian di lakukan Gampong Ujong Blang Kota Lhokseumawe, metode yang di gunakan dengan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis.

Sementara perbedaan Mursidah (2016) memfokuskan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di wilayah pusong kota Lhokseumawe. Sedangkan penelitian peneliti ini lebih memfokuskan tentang Strategi Pemerintah Terhadap Pembinaan Nelayan penelitian di lakukan Gampong Ujong Blang kota Lhokseumawe, dan metode yang di gunakan adalah pendekatan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptifanalisis.

Penelitian yang dilakukan oleh Zainal A. Muchlisin (2013) “ Persepsi Nelayan terhadap Kebijakan Subsidi Perikanan dan Konservasi di Kabupaten Aceh besa, Provinsi Aceh” dengan hasil yang diperoleh menyebutkan bahwa penelitian yang dilakukan bertujuan mengetahui persepsi masyarakat nelayan di Kabupaten Aceh Besar terhadap kebijakan sublisi perikanan dan program konservasi untuk dapat dijadikan dasar penetapan kebijakan oleh pihak terkaid. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar nelayan pernah mendapatkan bantuan dari berbagai sumber baik dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.

Lembaga yang paling banyak atau sering memberikan bantuan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan dan lembaga swadaya masyarakat/ NGO. Jenis bantuan yang umum diterima adalah dalam bentuk barang antara lain kapal, alat tangkap, dan mesin kapal sebagian kecil dalam bentuk uang tunai. Mayoritas nelayan menyatakan jenis bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan

mereka sebagai nelayan dan sebagian besar nelayan tersebut masih megarap kan agar kebijakan subsidi perikanan tetap terlanjutkan.

Persamaan penelitian Zainal A. Muchilisin dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang Nelayan dan sama-sama menggunakan metode kualitatif sedangkan perbedaannya adalah penulis lebih memfokuskan pada strategi pembinaan nelayan sedangkan Zainal A. Muchlisin lebih memfokuskan pada Persepsi Nelayan terhadap Kebijakan Subsidi Perikanan dan Konservasi dan tempat serta tahun yang berbeda.

Muhammad sauki (2008) dengan judul “Pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan melalui unit pelayanan dan pengembangan (UPP)” Di gampong Hagu Barat Laut dengan hasil yang diperoleh menyebutkan bahwa Program pemberdayaan yang dilakukan oleh unit pelayanan dan pengembangan (UPP)memberi daya bergulir (*Revoling fund*) yang di serahkan oleh ketua unit pelayanan dan pengembangan (UPP), namu peralatan alat tangkap yang diberikan sangat terbatas untuk masyarakat nelayan yang mengikuti pemberdayaan yang dikukan unit pelayanan dan pengembangan (UPP).

Strategi yang dilakukan unit pelayanan dan pengembangan (UPP) tidak berjalan dengan sempurna, namun strategi yang digunakan oleh unit pelayanan dan pengembangan (UPP) masih belum mengenai sasaran, kurangnya pembinaan, bimbingan maupun strategi pengembangan.

Pemanfaatan program yang dilaksanakan unit pelayanan dan pengembangan (UPP) tidak berjalan dengan baik, namun masyarakat Nelayan tidak memanfaatkan program pemberdayaan, karena masyarakat enggan

mengembalikan pinjaman dana bergulir(*refoling fund*) dan minimnya alat tangkap, serta minimnya tingkat pendidikan yang rendah.

Persamaan penelitian Muhammad Sauki dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang Nelayan dan sama-sama menggunakan metode kualitatif sedangkan perbedaannya adalah penulis lebih memfokuskan pada strategi pembinaan nelayan sedangkan Muhammad Sauki lebih memfokuskan pada Pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan melalui unit pelayanan dan pengembangan (UPP) dan lokasi serta tahun yang berbeda.

2.2 Landasan Teoritis

2.2.1 pengertian Strategi

Menurut David (2011:18-19) Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Rangkuti (2013:183) berpendapat bahwa strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Tjiptono (2006:3) istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Menurut Pearce II dan Robinson (2008:2), strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan Perusahaan dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Strategi adalah sebuah tindakan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan melakukan hal-hal yang bersifat

terus menerus sesuai keputusan bersama dan berdasarkan sudut pandang kebutuhan pelanggan.

2.2.2 Konsep Strategi

Siagian (2004) memberi definisi strategi sebagai serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Menurut Mintzberg (2007), konsep strategi itu sekurang-kurangnya mencakup lima pengertian atau arti yang saling terkait, dimana strategi adalah suatu:

1. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjangnya.
2. Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
3. Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktivitasnya.
4. Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya.
5. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing.

Strategi adalah suatu terencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu pada suatu bidang, yang akan memberikan pandangan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapai tujuan yang diinginkan (Assauri 1993:154)

Pengertian strategi secara umum dan khusus antara lain :

1. Pengertian Umum

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu data atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat terlaksana.

2. Pengertian Khusus

Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incrermental* (senantiasa meningkatkan) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang yang dihadapkan oleh pelanggan dimasa depan. Dengan demikian, Strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang sudah terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola.

lebih cenderung mengemukakan pendapatnya tentang bisnis. Dalam pengertian ini strategi diartikan sebagai suatu keputusan atau kebijakan yang dibuat petinggi organisasi dan kebijakan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh pihak dalam sebuah organisasi. Jelas disini bahwa strategi memang dibuat untuk mencapai sasaran dan tujuan.

J L Thompson dalam Sandra (2006) mendefinisikan strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir : ‘Hasil akhir menyangkut tujuandan sarana organisasi. Ada strategi yang luas untuk keseluruhan organisasi dan strategi

kompetitif untuk masing- masing aktifitas.Sementara itu, strategi fungsional mendorong secara langsung strategi kompetitif”.Bennett dalam Sandra (2006) menggambarkan strategi sebagai ‘arah yang dipilih organisasi untuk diikuti dalam mencapai misinya.

Menurut Nitisusastro (2009 : 163) strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai. Pengertian lain untuk strategi adalah ilmu dan seni memimpin dala tentara untuk menghadapi musuh dalam medan perang. Masih ada lagi arti strategi yakni rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.Yang menarik dalam batasan ini dua kata yakni ilmu dan seni.

Dari berbagai pengertian strategi menurut para ahli diatas, secara umum strategi merupakan suatu teknik yang disusun untuk mencapai suatu kemenangan atau tujuan tertentu.Strategi ini pada umumnya berkaitan dengan organisasi, dimana strategi ini dirancang oleh petinggi atau pemimpin organisasi supaya langkah yang dilakukan oleh organisasinya dapat mencapai sasaran ataupun tujuan jangka panjang dari organisasi.

2.3 Strategi Pembinaan

Menurut Barthon (2009:98) dalam Strategi pembinaan dikenal adanya trilogi latihan kerja sebagai berikut :

1. latihan kerja harus sesuai dengan pasar kerja dan kesempatan kerja;

2. latihan kerja harus senantiasa mutakhir sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. latihan kerja merupakan kegiatan yang sifat terpadu dalam arti proses kaitan dengan pendidikan, latihan dan pengembangan suatu dengan yang lain.

2.4 Pengertian pemerintah

Pemerintah mempunyai wewenang yang besar untuk merancang, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Gustino, 2008: 1). Sekarang pemerintah daerah tidak lagi sekedar sebagai pelaksana operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pusat, tetapi lebih dari itu diharapkan dapat menjadi agen penggerak pembangunan ditingkat daerah atau lokal.

Menurut Salam (2007:34) pemerintah adalah sekelompok orang yang diberikan suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

Menurut Salam (2007:37), pemerintah adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsinya

sebagaimana yang telah dinyatakan dalam peraturan perundang- undangan negara. Karena itu pemerintah berarti upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah berupa penerapan kewenangan dalam bentuk penataan, pengaturan, pengamanan, dan perlindungan terhadap masyarakat, penduduk, dan seluruh rakyat dalam segala kehidupan baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan kamtibmas. Lain halnya dengan pandangan yang dikemukakan Bagir Manan dalam Fahmal (2006:26), tentang pemerintah dan pemerintahan dalam arti administrasi, serta kewenangan administrasi. Menurutnya bahwa, pemerintah dalam arti luas, mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang- cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial atau alat- alat kelengkapan negara lain yang juga bertindak untuk atas nama negara.

Pemerintah merupakan suatu pembuat peraturan atau pembuat kebijakan, menurut C.F. Strong dalam syafiie (2005) pemerintahan mempunyai kewenangan untuk memelihara keamana dan kedamaian negara, ke dalam dan ke luar, maka pemerintah harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, pemerintah harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam pembuatan undang- undang, pemerintah juga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mecukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Kesimpulannya, pemerintah dapat diartikan sebagai suatu badan yang bertanggung jawab kepada masyarakat, menjalankan hak dan kewajiban pemerintah dan diperintah. Pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab

dalam pembuatan kebijakan yang harus dijalankan sesuai dengan tanggung jawab, hak dan kewajiban yang diemban. Sehingga suatu pemerintah dapat bejalan sebagaimana yang diharapkan.

2.4.1 Tugas Pemerintah

Menurut Rasyid (2003:13) secara umum tugas- tugas pokok pemerintah mencakup :

1. “Menjamin keaman negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemerontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara- cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara alami.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang- bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga nonpemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
4. Melakukan upaya- upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin, memelihara orang cacat, jompo dan anak- anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya.

5. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain secara langsung menjamin meningkatkan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
6. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan”.

Labolo (2006:22), merumuskan bahwa “ pemerintah memiliki fungsi memimpin memberi petunjuk, memerintah, menggerakkan, mengkoordinasi, pengawasan, dan motivasi dalam hunungan pemerintahan”. Pemerintah memiliki fungsi primer atau fungsi pelayana, fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi Primer , yaitu fungsi pemerintah sebagai *provied* jasa-jasa publik yang tidak dapat *diprivatisasikan* yaitu jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi. Fungsi sekundrr yaitu sebagai *provider* kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

2.5 Konsep Pembinaan

Menurut Sinambela (2012:217).” Pembinaan berasal dari kata “*bina*”yang berarti sama dengan “*bangun*”, Jadi pembinaan dapat diartikan sebagai kegunaan yaitu: mengubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai- nilai yang tinggi”. Dengan demikian pembinaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu melakukan usaha- usaha untuk membuat sesuatu menjadi

lebih sesuai dan cocok dengan kebutuhan dan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

Menurut Tanzeh (2009: 144), Pembinaan juga dapat diartikan : “bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan bertujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.

Menurut Mitha Thoha Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu: 1. pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan; 2. Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu.

Menurut Tangdilintin (2008:58) pembinaan dapat diibaratkan sebagai pelayanan. Pembinaan sebagai pelayanan itu merupakan suatu keprihatinan aktif yang nyata dalam tindakan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat orang muda, serta mengangkat harga diri dan kepercayaan diri mereka. Dengan melihat pembinaan sebagai pelayanan, seorang pembina tidak pernah mencari nama, popularitas, atau kedudukan dan kehormatan dengan memperlakuk orang muda.

Tangdilintin (2008: 61) pun menyatakan pembinaan akan menjadi suatu “*empowerment*” atau pemberdayaan dengan maksud.

1. “Menyadarkan dan membebaskan
2. Memekarkan potensi dan membangun kepercayaan diri
3. Menumbuhkan kesadaran kritis

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Pengertian Pembinaan Menurut Psikologi Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan.

2.5.1 Fungsi & tugasnya Pembinaan

Menurut Thoha (2001:13)” untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, maka diperlukan adanya pegawai- pegawai yang setia, taat, jujur, penuh dedikasi, disiplin dan sadar akan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang –undangan kepegawaian yang berlaku”, fungsi pembina diarahkan untuk :

1. Memupuk kesetiaan
2. Meningkatkan adanya rasa pengabdian rasa tanggung jawab, kesungguhan dan kegairahan bekerja dalam melaksanakan tugasnya
3. Meningkatkan gairah dan produktivitas kerja secara optimal

4. Mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan bewibawa

Memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi (wadah yang ditentukan). Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintah daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintah daerah tersebut.

2.5.2 Karakteristik Pembinaan

Menurut Bell dan Thoha (2006:201), mengidentifikasi karakteristik pembinaan yaitu :

1. “ Lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses organisasi di bandingkan dengan isi dan substantif
2. Memberikan penekanan pada kerja tim sebagai suatu kunci untuk mempelajari lebih efektif mengenai berbagai perilaku
3. Memberi penekanan pada manajemen yang kolaboratif dari budaya kerja tim
4. Memberi penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem kerja keseluruhan
5. Mempergunakan model”*action rescarch*”
6. Mempergunakan ahli- ahli perilaku sebagai agen pembaharuan atau kerkatalisator

7. Suatu pemikiran dari usaha- usaha perubahan yang ditujukan bagi proses- proses yang sedang berlangsung
8. Memberi penekanan pada hubungan- hubungan kemanusiaan dan sosial.

2.6 Pengertian Masyarakat Nelayan Pesisir

Menurut Pedoman umum penataan Ruang Pesisir dan Palau – pulau Kecil, wilayah pesisir didefinisikan sebagai daerah pertemuan antara darat dan laut. Kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat- sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perenbesan air asin.

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang tinggal dipesisir yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara penangkapan atau budidaya. Mereka pada umumnya tinggal dipinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatan.

Emorson menyatakan bahwa keluarga nelayan umumnya lebih miskin dari pada petani atau pengrajin, menurutnya keluarga nelayan sudah dikenal miskin walaupun tidak terjadi krisis ekonomi. Jika dibandingkan daerah sawah pengairan, maka pada daerah pantai dengan mata pencaharian pokok sebagai nelayan, kemiskinan lebih nyata.

Menurut Kusnadi (2009), secara geografis, Nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Sebagai suatu sistem masyarakat nelayan terdiri atas kategori- kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Faktor kebudayaan ini

menjadi pembeda masyarakat dari kelompok sosial lainnya. Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung maupun tidak langsung, menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumberdaya perikanan. Mereka menjadi komponen utama konstruksi masyarakat maritim Indonesia. Salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat pesisir adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah karena tingkat pendidikan yang rendah, tingkat pendidikan mereka pada umumnya hanya lulusan atau tidak tamat sekolah dasar. Tingkat pendidikan yang rendah disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, kesadaran pendidikan yang kurang, dan sulitnya lulusan sekolah dasar mengakses karena hambatan letak geografis.

Dahuri, dalam Anwar (2006:37) Masyarakat nelayan merupakan kelompok masyarakat yang pekerjaannya adalah menangkap ikan. Sebagian hasil tangkapan tersebut dikonsumsi untuk keperluan rumah atau dijual seluruhnya.

2.6.1 kriteria Nelayan

1. Nelayan Penuh

Nelayan tipe ini hanya memiliki satu mata pencaharian, yaitu sebagai nelayan. Hanya menggantungkan hidupnya dengan profesi kerjanya sebagai nelayan dan tidak memiliki pekerjaan dan keahlian selain menjadi seorang nelayan.

2. Nelayan Sambilan

Nelayan tipe ini mereka menjadikan nelayan sebagai profesi utama tetapi memiliki pekerjaan lainnya untuk tambahan penghasilan. Apabila sebagian

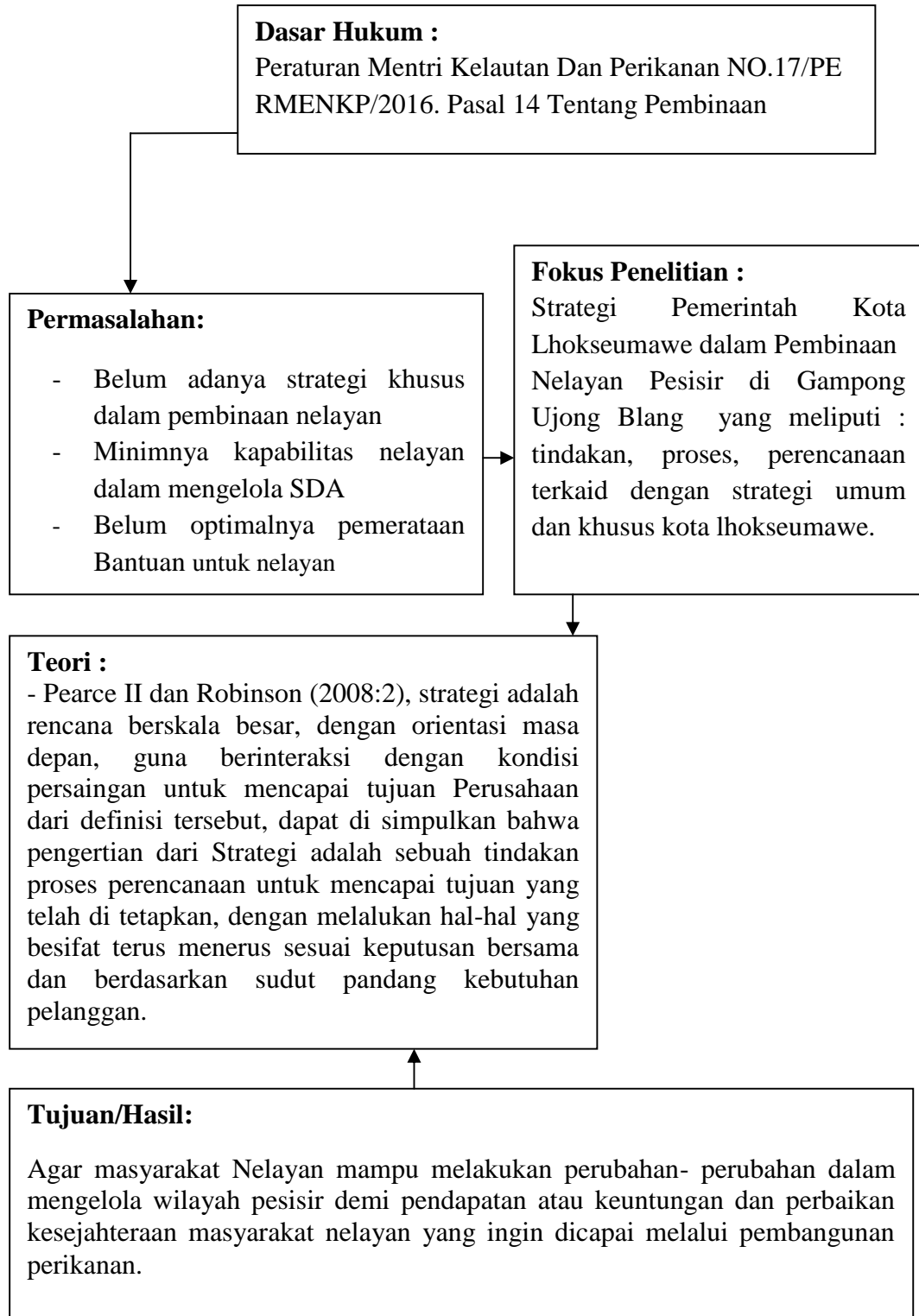
besar pendapatan seseorang berasal dari kegiatan penangkapan ia sebagai nelayan.(Mubyarto,2002:18)

3. Nelayan Sambilan Tambahan

Nelayan tipe ini biasanya memiliki pekerjaan lain sebagai sumber penghasilan, sedangkan pekerjaan sebagai nelayan hanya untuk tambahan penghasilan.

2.7 Landasan Konseptual

2.7.1 Kerangka Pemikiran



Pembinaan nelayan pesisir merupakan pengembangan masyarakat nelayan agar dapat mandiri dan berdaya untuk bisa mengelola wilayah pesisirnya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMENKP/2016 Tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Pasal 14 yaitu

Pembinaan pemberian Bantuan Pemerintah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan dan Kepala Dinas, sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi: pemberian pedoman, fasilitasi, penyuluhan/pendampingan, pelatihan, dan bimbingan teknis. Pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan secara terpadu. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya.

Pembinaan masyarakat nelayan merupakan proses penerangan. Penerangan kepada masyarakat nelayan tentang segala sesuatu yang belum diketahui dengan jelas untuk dilaksanakan dan diterapkan dalam rangka peningkatan produksi dan pendapatan atau keuntungan yang ingin dicapai melalui proses pembangunan perikanan. Penerangan yang dilakukan tidaklah sekedar memberikan penerangan, tetapi penerangan yang dilakukan selama pembinaan masyarakat nelayan harus terus menerus dilakukan sampai betul-betul diyakini oleh pembina bahwa segala sesuatu yang telah diterangkan benar-benar telah dipahami, dihayati dan dilaksanakan oleh masyarakat nelayan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian ini di Kota Lhokseumawe, Khususnya di Gampong Ujong Blang. Gampong Ujong Blang adalah salah satu Gampong di Kota Lhokseumawe yang memiliki sumber daya yang besar dalam hal perikanan laut. Dengan jumlah penduduk 4729 Jiwa yang bekerja sebagai nelayan kurang lebih 900 jiwa,(Sumber: Kantor Keuchik Ujong Blang dan wawancara panglima laot). Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak terkait yang dapat menjelaskan lebih rinci mengenai strategi dalam pembinaan nelayan di Gampong Ujong Blang Kota Lhokseumawe dan lokasi yang dipilih oleh penulis dilihat berdasarkan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah “kualitatif” yaitu suatu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dan fenomena yang diteliti. (herdiansyah dalam Asmalinda 2017: 33). Menurut moleong, (2007:3) mengemukakan bahwa “metodelogi kualitatif merupakan prosedur penelitian

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dapat memberi informasi/ data yang terkait dengan masalah dan fokus penelitian yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah :

N0	Nama Informan	Jabatan
1	Alamsyah S.st.pi	Seksi Perikanan Tangkap dan Kenelayanan
2	Maimun, S.Sos	Kabid Penyuluhan
3	Tgk Basyir Husaini	Keucik Ujong Blang
4	Abdullah	Panglima Laot
5	Musmulyadi	Masyarakat Nelayan yang mendapatkan bantuan

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersifat data asli dan bukan data yang sudah diolah. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber aslinya melainkan diperoleh dari unsur-unsur kepustakaan.

1. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian langsung di lapangan yang bersumber pada penelitian dan wawancara dengan

Masyarakat Nelayan, Panglima Laot, Sekretaris Desa, Kepala kasi Bidang Kelautan di Dinas Kelautan dan Perikanan. .

2. Data sekunder dari penelitian ini terdiri dari bahan-bahan yang diperoleh dari perpustakaan, internet, atau karya tulis yang relevan dengan penelitian ini dan melalui observasi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, peneliti menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu :

1. Pengamatan (*Observasi*)

Dalam hal ini, peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif. Menurut Moleong (2005:174) yang menyatakan bahwa “observasi partisipasi pasif merupakan observasi yang dilakukan peneliti dengan cara mendatangi langsung, melihat, kemudian mencatat perilaku sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Mengamati sendiri ketempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut”. Maka dalam penelitian ini peneliti mendatangi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek yang di observasi.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah melakukan komunikasi secara langsung dengan maksud tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara secara tidak terstruktur. Menurut (Moleong, 2005:191) mengatakan bahwa : “wawancara tidak tersruktur adalah wawancara lebih bebas yang diajukan oleh

peneliti kepada pihak informan bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, mendalami situasi sehingga peneliti lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlukan. Teknik yang digunakan melalui *purposive* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dianggap mempunyai keterkaitan terhadap populasi yang telah diketahui sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung kepada subjek penelitian. Dalam menjalankan teknik ini, peneliti tidak memperoleh data langsung dari subjek yang diteliti namun mempelajari sumber dokumentasi dari objek penelitian seperti laporan, peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku.. Menurut Iskandar (2009:135) “studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian masalah.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu sistematis yang mampu memberikan proses yang sistemik terhadap hasil penelitian. Sehingga memberikan hasil penelitian dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Dalam menganalisis data dalam

penelitian ini penulis menggunakan model analisis interaktif sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Moleong (2005:28) yang meliputi:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah usahayang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data-data yang dianggap relevan dengan kebutuhan data dalam judul yang diangkat dalam suatu penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah langkah yang dilakukan setelah pengumpulan data dan memasukkannya ke dalam suatu penelitian dengan ketentuan data yang sudah terkumpul harus relevan.

3. Verifikasi Data

Adalah suatu upaya untuk menemukan kesesuaian dan kelayakan data penelitian sehingga data tersebut dianggap mampu memberikan hasil yang relevan dan sesuai.

4. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan diambil dari pemahaman penulis terhadap informasi-informasi yang diperoleh dari hasil verifikasi data. Kesimpulan yang diambil diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan terarah sesuai dengan maksud dari penelitian.

3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian

Untuk mendukung kegiatan penelitian ini, penulis melakukan tahapan-tahapan dalam proses untuk pengembangan suatu penelitian yang berdasarkan data-data yang telah disebutkan di atas. Adapun jadwal Penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara administrasi, Kota Lhokseumawe di bagi dalam 4 (empat) wilayah kecamatan, yaitu kecamatan banda sakti, Muara Dua, Blang Mangat an Muara Satu yang merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Muara Dua sejak tahun 2006. Keempat kecamatan ini meliputi 9 (sembilan) kemukiman, 68 (enam puluh delapan) Gampong.



Gambaran 4.1 Peta Administrasi Kota Lhokseumawe

Kecamatan Muara Dua merupakan kecamatan yang memiliki wilayah paling luas. Kecamatan ini memiliki luas 57,80Km² atau hampir 31,92% dari keseluruhan wilayah kota ini. Kecamatan Blang Mangat memiliki luas wilayah seluas 56,12Km² atau 31% dari luas wilayah kota lhokseumawe. Sementara banda sakti adalah kecamatan paling kecil,wilayahnya, yaitu hanya 11,24Km² atau 6,21% dari total luas daerah ini. Sementara Muara Satu, Sebagai Wilayah pemekaran dari Muara Dua memiliki luas 55,90Km² atau 30,87%. Luas Wilayah menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe disajikan pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

Luas wilayah menurut kecamatan Kota Lhokseumawe

No	Kecamatan	Luas ($\frac{\text{Kota Lh.}}{\text{Km}^2}$)	Persentase(%)
1	Banda Sakti	11,24	6,21
2	Muara Dua	57,80	31,92
3	Blang Mangat	56,12	30,99
4	Muara Satu	55,90	30,87
Jumlah		181,06	100,00

(Sumber : BPS Lkokseumawe 2017)

Kota Lhokseumawe merupakan bagian dari Provinsi Aceh yang terletak diantara 04⁰54⁰- 05⁰-18⁰ LU – 96⁰20⁰ – 97⁰21⁰ BT. Kota ini memiliki wilayah sekitar 181,06 Km², dengan batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan Kuta Makmur)
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan Dewantara)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan Syamtalira Bayu)

Letak geografis Gampong Ujong Blang yang terdiri dari 4 (empat) dusun yang terletak dalam wilayah Kecamatan Banda sakti, dengan luas wilayah 160 Ha, dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Blang Panyang Kec. Muara Satu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Ulee Jalan Kec. Banda Sakti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Banda Masen Kec. Banda Sakti
- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka

Jumlah Penduduk Ujong Blang berdasarkan data Profil Gampong Ujong Blang adalah 4.585 jiwa dengan komposisi penduduk lelaki 2.332 jiwa dan perempuan 2.253 jiwa, jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.240 KK dengan kepadatan penduduk 50,00 per KM, yang tersebar di dalam 4 Dusun.

MAYORITAS PENDUDUK

Pekerjaan	Jumlah
Nelayan	673 Orang
PNS	17 Orang
Buruh	54 Orang
Pedagang	36 Orang
TNI/POLRI	5 Orang

(Sumber Data Kantor Keuchik Ujong Blang Kota Lhokseumawe)

4.1.2 Visi-Misi Dinas Kelautan, Perikanan, Dan Pertanian Kota Lhokseumawe

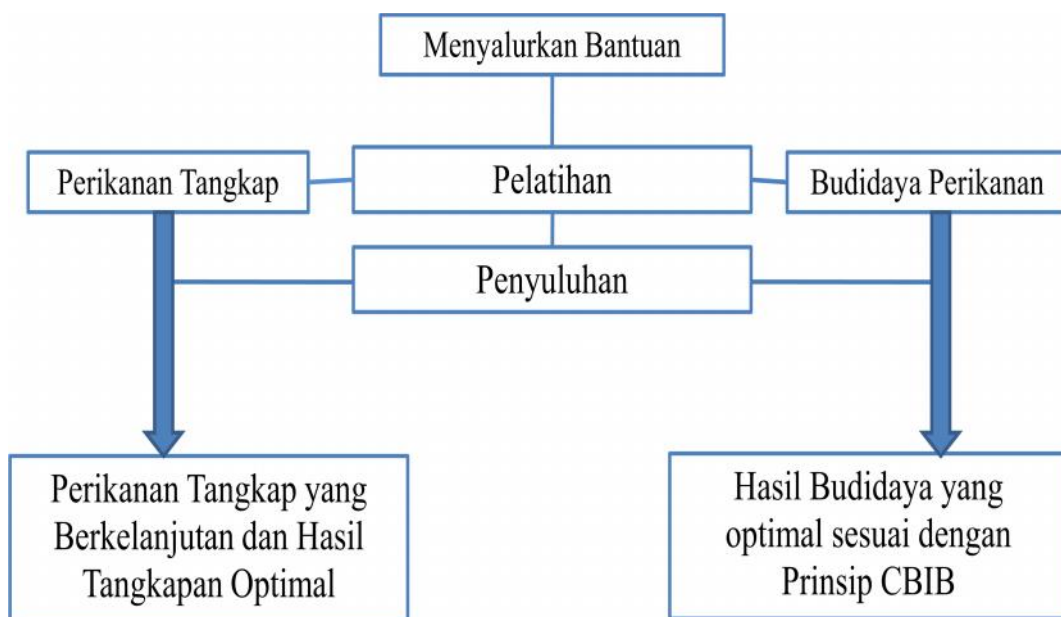
- a. Pemberdayaan dan kualitas aparatur dibidang kelautan, perikanan, pertanian dan perkebunan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan kemampuan industri perikanan skala kecil dan menengah melalui kegiatan yang mendukung perkembangan Usaha.
- c. Mendorong pertumbuhan perekonomian Kota Lhokseumawe yang berbasis Iklim Kondusif bagi usaha perdagangan dan industri sesuai dengan potensi di bidang kelautan, perikanan, dan perkebunan/ kehutanan beserta lainnya.
- d. Meningkatkan pangsa pasar Produk Unggulan Daerah dibidang kelautan, perikanan, pertanian dan perkebunan/ kehutanan, melalui pameran produk kelautan, perikanan dan pertanian dalam dan luar negeri.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan rencana dan program kerja DKPP
- b. Merumuskan kebijakan umum dan petunjuk teknis dalam bidang kelautan, perikanan dan pertanian.
- c. Mengkaji dan menyusun konsep kebijakan dalam bidang kelautan, perikanan dan pertanian.
- d. Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan konsep produk hukum daerah yang berhubungan dengan pembangunan dalam bidang kelautan, perikanan dan pertanian serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil- hasilnya.
- e. Melaksanakan kebijakan pemantauan produksi dan ketersediaan/ cadangan pangan strategis nabati dan hewani.
- f. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan kesempatan usaha yang merata bagi petani dan nelayan melalui bimbingan dan penyuluhan.
- g. Melaksanakan pembinaan, pengelolaan tenaga teknis sebagai sumber daya dalam bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan.
- h. Menyusun rencana kerja dan kebutuhan anggaran pada DKPP
- i. Mengkoordinasikan kegiatan fungsional dan pelaksanaan fungsi dalam bidang DKPP dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait lainnya dalam bidang kelautan, perikanan dan pertanian

- j. Melaksanakan evaluasi penyusunan laporan keuangan dan kinerja serta laporan tanggung jawab DKPP
- k. Melaksanakan pembinaan pengelolaan unit pelaksanaan teknis dinas.
- l. Melaksanakan kerjasama survey, evaluasi pelaporan potensi di bidang kelautan, perikanan dan pertanian
- m. Melaksanakan tugas- tugas kedinasan lain yang diberikan oleh walikota. *(Sumber: Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian, 2017)*

4.1.3 Kontribusi Pemerintah Dalam Manajemen Kelautan Dan Perikanan



Kontribusi pemerintah dalam manajemen kelautan dan perikanan adalah dengan memberi sesuatu yang bernilai bagi nelayan seperti menyalurkan bantuan guna mempermudah nelayan dalam melakukan aktivitas melaut. Kontribusi manajemen tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan kategori nelayan

budidaya tangkap ataupun budidaya perikanan bantuan yang diberikan sesuai dengan keperluan masing- masing.

4.1.4 Strategi Pemerintah Kota Lhokseumawe Dalam Pembinaan Nelayan Pesisir

Strategi adalah trik atau cara pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Melalui pembinaan, masyarakat nelayan memiliki pengetahuan luas tentang berbagai ilmu dan teknologi perikanan dan kelautan, memiliki sikap yang progresif untuk melakukan perubahan dan inovatif terhadap sesuatu yang baru, serta trampil dan mampu berswadaya untuk mewujudkan keinginan dan harapan-harapannya demi tercapainya perbaikan kesejahteraan masyarakat nelayan. Strategi pemerintah dalam pembinaan nelayan harus dengan menggunakan strategi dan mengedepankan fasilitas untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam mengelola program/ kegiatan pembinaan masyarakat. Kenapa bisa? Karena dengan adanya program maupun kegiatan yang dilakukan masyarakat Nelayan mampu melakukan perubahan-perubahan dalam mengelola wilayah pesisir demi pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat nelayan. Strategi ini sangat penting karena pada dasarnya, pemerintah banyak memberikan bantuan ataupun program terhadap masyarakat nelayan.

Agar masyarakat nelayan dapat bekerja dengan baik dengan diberikan program ataupun strategi pemerintah dalam konteks pembinaan selama ini yaitu lebih kepada penyaluran bantuan, dikarenakan strategi pembinaan yang dilakukan

dengan cara penyuluhan atau sosialisai banyak masyarakat yang tidak peduli arti pentingnya pembinaan tersebut. Maka dari ini pemerintah lebih mengutamakan strategi pembinaan berupa bantuan dari pemerintah supaya tidak ada lagi masyarakat nelayan yang tidak alat tangkap untuk melaut. Peran pemerintah pusat dan daerah bisa diposisikan dalam kegiatan- kegiatan manajeria dalam memberikan wawasan, pengetahuan dan keterampilan serta pendidikan mengenai manajemen usaha perikanan. Harapannya lewat strategi ini para nelayan dapat meningkatkan ekonomi sosial dan kesejahteraan secara mandiri. Dan pembinaan dan pelatihan diperlukan sebagai peran penting pemerintah untuk menciptakan masyarakat nelayan dalam melakukan perubahan- perubahan dalam mengelola wilayah pesisir demi pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat nelayan serta meningkatkan ekonomi masyarakat.(*Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian,2017*)

Pembinaan dapat diartikan sebagai bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui pembinaan dengan bertujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan. pembinaan masyarakat nelayan yang merupakan bagian dari pembangunan perikanan yang berkelanjutan di Indonesia perlu memperhatikan dan memahami secara baik. Keterkaitan dengan hal ini pembangunan apapun pengertian yang diberikan terhadap hasil strategi, selalu bertujuan pada upaya perbaikan, terutama perbaikan pada mutu kehidupan manusia, baik secara fisik, materiil, ekonomi politik, maupun sosia budaya.

Strategi Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian mempunyai fokus pembinaan yaitu untuk membina masyarakat nelayan secara umum dan khusus secara umum yaitu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu data atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat terlaksana dengan diberikan program bantuan kepada masyarakat nelayan yaitu suatu bantuan berupa alat- alat tangkap seperti : Boat, Piber, Pukat, jaring dan mesin boat. Setelah bantuan diberikan barulah dari pihak pemerintahan memberikan penyuluhan dan pengarahan kepada masyarakat. Sedangkan Strategi khusus merupakan tindakan yang bersifat *incrremental* (senantiasa meningkatkan) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang yang dihadapkan oleh nelayan dimasa depan. dengan diberikan program bantuan kepada masyarakat nelayan yaitu suatu bantuan berupa alat- alat tangkap seperti : Boat, Piber, Pukat, jaring dan mesin boat. Setelah bantuan diberikan barulah dari pihak pemerintahan memberikan penyuluhan dan pengarahan kepada masyarakat dan dengan cara dilakukan terus menerus Dengan demikian, Strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang sudah terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola.

Alat tersebut diberikan kepada masyarakat nelayan yang membutuhkan atau mencari penghasilan yang bekerja sebagai melaut. Untuk masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan harus membuat proposal terlebih dahulu. Adapun program pembinaan diberikan kepada masyarakat nelayan oleh dinas kelautan perikanan dan pertanian.

4.1.4.1 Tindakan pemerintah Kota Lhokseumawe dalam melakukan Strategi pembinaan

Adapun Tindakan yang dilakukan pemerintah kota lhokseumawe dalam konteks strategi pembinaan yaitu berupa Program yang akan diberikan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian kepada masyarakat nelayan yang melaut itu biasa alat- alat tangkap.

Seperti yang disampaikan oleh Alamsyah,S.ST.Pi, Selaku Seksi Kelautan beliau mengatakan bahwa :

“sebelumnya sudah pernah diberikan pembinaan kepada nelayan yaitu sosialisasi mengenai apa yang belum nelayan pahami baik dari segi penggunaan kartu nelaya agar nelayan mempunyai kartu tersebut. Namun sebagian nelayan merasa bahwa hal demikian itu tidaklah penting. makanya pihak perintahan hanya melakukan pembinaan melalui pemberian bantuan ”.(wawancara, 14 Desember 2017)

Berdasarkan wawancara diatas mendeskripsikan bahwa memang pembinaan yang dilakukan oleh pemerintahan dalam bentuk penyuluhan atau sosialisai itu pernah dilakukan namun kesadaran dari nelayan tersebut merasa tidaklah penting maka pihak dari pemerintah sekarang hanya mengedepankan strategi pembinaan dalam bentuk pemberian bantuan. adapun bantuan yang diberikan berupa barang bukan finansial. Namun jumlah bantuan yang disalurkan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian tidak terdata secara detail.

Seperti yang diungkapkan Tgk Basyir Husaini selaku keuchik Gampong Ujong Blang bahwa :

“Dengan bantuan yang selama ini sudah diberikan kepada masyarakat Ujong Blang sangatlah membantu masyarakat Ujong Blang untuk

mendapatkan bantuan untuk mencari penghasilan dengan barang bantuan tersebut, barang bantuan yang diberikan memiliki nilai yang bermanfaat kepada masyarakat, Cuma tergantung masyarakat cara menggunakannya dan merawatnya apa yang sudah diberikan”,(Wawancara : 15 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas mendeskripsikan bahwa setiap barang bantuan yang diberikan memiliki nilai ekonomi tersendiri, namun cara menggunakannya tergantung pada individu masing- masing, karena ada yang mendapatkan barang bantuan tersebut digunakan untuk memudahkan aktivitasnya dalam melaut demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari- hari. Dan ada juga yang menggunakan barang bantuan untuk mendapatkan uang yang instan yaitu setelah barang bantuan diterima kemudian dijual demi mendapatkan rupiah.

Seperti yang di ungkapkan Alamsyah S.St.Pi selaku seksi kelautan menyatakan bahwa :

“setiap barang bantuan yang diberikan kepada masyarakat, tujuannya adalah untuk membantu mereka dalam permasalahan perekonomian keluarga yang rendah dan tentu untuk mensejahterakan masyarakat ujung blang”(wawancara 21 Desember 2017)

Dengan adanya barang bantuan yang diberikan kepada masyarakat diharapkan untuk mempermudah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dalam bekerja, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga terpenuhi akan tetapi kebanyakan dari mereka menyalahgunakan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ismail selaku Nelayan di Ujong Blang Ismail menyatakan bahwa:

“yang saya liat tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, karena kalau memang adanya pengawasan yang dilakukan, tidak mungkin terjadi aksi jual beli dan untuk bantuan besar seperti boat diaihkan kepada orang lain”.(wawancara 18 November 2017)

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa selama ini pemerintah tidak melakukan pengawasan kepada masyarakat, sehingga masyarakat leluasa melakukan penyelewengan- penyelewengan terhadap barang bantuan yang diberikan. Jadi dengan demikian pemerinta tidak mengetahui tentang perkembangan yang terjadi di masyarakat sehingga tidak ada keberlanjutan dari program tersebut.

Seperti pernyataan Rizal mengenai keberlanjutan program mengatakan bahwa :

“berbicara keberlanjutan program mengenai keberlanjutan tidaknya bantuan yang diberikan untuk kelompok nelayan bisa dikatakan tidak ada keberlanjutan secara kelompok, karena tidak ada satu kelompok pun yang bekerja sama menggunakan barang bantuan tersebut, misalnya seperti boat, setelah boat diberikan, langsung berpindah tangan kepada toke, kalaupun ada seperti yang mendapatkan bantuan alat tangkap ikan lain seperti pukat, piber, dan lain sebagainya bantuan tersebut pasti dibagikan dan tida sedikit pula dari mereka yang menjualnya”.(wawancara 10 Desember 2017)

4.1.4.2 Proses strategi pembinaan nelayan pesisir kota Lhokseumawe

Alat- alat yang diberikan supaya masyarakat dapat mencari penghasilan, program bantuan akan diberikan setelah mereka sudah memenuhi dan membuat proposal yang berkelompok tidak individu, karena dinas mengharap setelah program diberikan digunakan dengan baik, jangan hanya bantuan tersebut setelah mendapatkannya tidak dirawat dan dibiarkan begitu saja tidak dipakai. Selama ini pemerintah banyak memberikan bantuan kepada masyarakat Ujong Blang yaitu, dengan cara masyarakat mengajukan permohonan bantuan (proposal) kepada pemerintah atas nama kelompok yang beranggotakan rata-rata 10 orang anggota kelompok. Seperti yang disampaikan oleh Ir. Zainuddin, MM selaku Kabid kelautan dan perikanan, beliau menyatakan bahwa :

“untuk mendapatkan bantuan pemohon harus mengajukan permohonan atau proposal secara berkelompok dan melampirkan persyaratan-persyaratan, kemudian setelah kami menerima proposal tersebut kami mensevri apakah benar mereka nelayan”. (Wawancara 19 Desember 2017).

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa apabila masyarakat yang membutuhkan bantuan guna untuk mendapatkan pembinaan yang diberikan oleh pemerintah perlu memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dan mengikuti arahan selanjutnya seperti pihak yang berwenang melakukan wawancara secara satu persatu disetiap masyarakat nelayan tersebut.

Pernyataan diatas sejalan dengan apa yang di ungkapkan oleh Mulyadi selaku nelayan Ujong Blang yang menjelaskan bahwa :

“apabila ada proposal yang diajukan untuk mendapatkan bantuan tidaklah hanya kepentingan pribadi, tapi atas nama kelompok, yang rata- rata

beranggotakan 10 orang .adapun bantuan yang diterima yaitu berupa mesin boat apncing. Dan setiap kelompok harus melengkapi berkasnya”.
(Wawancara, 14 Desember 2017)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa setiap masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan harus mengajukan proposal terlebih dahulu, dan proposal yang diajukan adalah proposal kelompok yang rata- rata beranggota 10 orang anggota kelompok, dan proposal harus melengkapi berkas yang merupakan persyaratan dalam pembuatan proposal.

Selama ini sudah banyak bantuan yang disalurkan untuk para nelayan gampong, bahkan setiap tahun Ujong Blang selalu mendapatkan bantuan. Hasil bantuan yang diberikan kepada nelayan yang berupa barang bukan berupa finansial. Adapun bantuan yang diberikan kepada nelayan seperti bot, nyareng, pukot, piber dan mesin boat.

Seperti yang disampaikan oleh Alamsyah,S.ST.Pi, Selaku Seksi Kelautan beliau mengatakan bahwa :

“Selama ini sudah banyak bantuan yang diberikan untuk Ujong Blang, seperti boat, alat tangkap, piber, ancak dan bahkan setiap tahunnya Ujong Blang selau mendapatkan bantuan guna untuk menambah perekonomian masyarakat”.(wawancara, 20 Desember 2017)

Berdasarkan wawancara diatas mendeskripsikan bahwa setiap tahunnya selalu ada bantuan yang diberikan kepada masyarakat Ujong Blang, adapun bantuan yang diberikan berupa barang bukan finansial. Namun jumlah bantuan yang disalurkan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian tidak terdata secara detail.

Ditambahkan oleh Hafifuddin selaku masyarakat Ujong Blang menjelaskan bahwa :

“Saya lihat setiap tahun selalu ada bantuan dari pemerintah yang diberikan untuk nelayan digampong kami, bahkan saya lihat bantuan tersebut bermacam- macam ada yang mendapatkan pukot, ada yang mendapatkan piber, ada juga mendapatkan boat. Itu semua tergantung permohonan yang diajukan oleh masing- masing kelompok”.(wawancara, 19 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan kepada masyarakat ujong blang itu berbeda- beda, dan jenis bantuan yang diberikan bukanlah Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian yang menentukan bantuan seperti apa, akan tetapi masyarakat Ujong Blang menentukan sendiri jenis bantuan yang diinginkan dengan kata lain bantuan yang diberikan sesuai permintaan atau permohonan masyarakat yang diajukan.

Kemudian dilanjutkan oleh Dedi selaku masyarakat Ujong Blang yang pernah mendapatkan bantuan juga menyatakan bahwa :

“bantuan perlengkapan yang dibutuhkan oleh nelayan seperti jareng, pukot, piber, ancak dan boat sudah diberikan untuk Ujong Blang, contohnya saya adalah anggota kelompok yang pernah mendapatkan bantuan tersebut berupa piber,”(wawancara 23 November 2017)

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan merupakan barang yang sangat diperlukan untuk nelayan dalam kegiatan melaut. Dengan bantuan tersebut memudahkan nelayan dalam mencukupi kebutuhan dan dalam meningkatkan ekonomi.

Seperti yang disampaikan oleh Alamsyah,S.st.Pi, selaku seksi kelautan beliau menyatakan bahwa :

“ Tidak ada suatu pengkapasita dari kelompok karena ada beberapa kelompok yang tidak bertahan dalam diberikan bantuan tersebut, bantuan yang seharusnya dipergunakan untuk menghasilkan uang, tapi malah disalah gunakan bantuan yang sudah diberikan, jadi bantuan yang sudah diberikan kepada masyarakat Ujong Blang tidak ada pengkapasitasan, melainkan bantuan yang dijual begitu saja” (wawancara 20 Desember 2017).

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pengkapasitasan suatu bantuan yang diberikan belum berjalan di Ujong Blang. Karena bantuan yang sudah diberikan tidak dipergunakan dengan baik.

Tujuan pemerintah memberikan pembinaan berupa bantuan kepada masyarakat Ujong Blang tidak lain adalah untuk merencanakan dan membina masyarakat ujong blang bukan untuk sesaat tetapi untuk seterusnya, jadi dengan adanya barang bantuan tersebut dapat mempermudah masyarakat nelayan dalam menjalankan aktivitasnya sebagai nelayan.

Ditambah oleh Rasyidin selaku masyarakat Ujong Blang mengatakan bahwa :

“Bantuan yang diberikan hanya sampai pada tahap pemberian bantuan saja atau hanya sebatasnya, setela itu tida ada pembinaan dan tidak ada pengawasa. Jadi setela barang diterima oleh masyarakat tidak ada pemantauan untuk melihat perkembangan dari bantuan tersebut”.(wawancara 13 Desember 2017)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa selama ini bantuan secara percuma- Cuma kepada masyarakat tanpa harus dikembalikan serta tidak adanya pengarahan yang baik terhadap terhadap bantuan yang diberikan.

4.1.4.3 Perencanaan Strategi Pembinaan Nelayan Pesisir Kota

Lhokseumawe

Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian (DKPP) merupakan dinas yang selama ini menyalurkan bantuan kepada masyarakat nelayan dengan melalui perencanaan sebaik mungkin.

Seperti yang disampaikan oleh Maimun,S.Sos Selaku Kabid penyuluhan beliau mengatakan bahwa :

“Setiap kegiatan itu dilakukan terkadang berdasarkan sk yang dikeluarkan oleh walikota yang berhubungan dengan pembinaan nelayan dan dana dari kegiatan tersebut di tanggung oleh dinas kelautan, perikanan dan pertanian”(wawancara 20 Desember 2017)

Dari wawancara diatas dapat dideskripsikan bahwa sanya setiap kegiatan yang dilakukan Dinas Kelautan, Perikanan dan pertanian sesuai dengan SK yang telah ditetapkan baik itu dalam menyusun strategi ataupun dalam pelaksanaan ,program yang telah di susun.

Berbagai macam alasan yang dikemukakan ketika berbicara penyebab barang bantuan dijual. Seperti yang dinyatakan Nadi nelayan yang merupakan salah satu masyarakat yang menjual barang bantuan, menyatakan bahwa :

“Alasan saya menjual barang bantuan karena bantuan yang saya dapatkan tidak ada uang untuk keperluan membeli Bahan bakar minyak (BBM) untuk melaut kemudian juga menjual barang bantuan tersebut”(wawancara 15 Desember 2017)

Wawancara diatas mendeskripsikan bahwa barang bantuan yang diberikan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari, walaupun uang tersebut digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhannya sehari saja. Pada intinya

Dilihat dari kapasitas nelayan justru masyarakat yang tidak menerima bantuan lebih meningkat dikarenakan bantuan yang diterima oleh kelompok nelayan dijual kepada masyarakat lain yang lebih memiliki modal dengan harga yang lebih murah.

Sebagaimana pernyataan Pokdin masyarakat Ujong Blang mengatakan bahwa :

“Kebanyakan dari mereka yang mendapatkan barang bantuan atas nama kelompok seperti boat, itu menjadi milik pribadi salah satu dari anggota kelompok, dengan cara boat tersebut dijual kepada salah satu dari mereka atau biasanya orang bilang *tulak peng*(dijual) dengan harga yang lebih murah dan uang dibagi sama rata kepada anggota kelompok tersebut”.(wawancara : 15 Desember 2017).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat yang menerima bantuan diutamakan yang sudah memiliki kelompok.

Pernyataan bersamaan juga dijelaskan oleh Abdullah selaku Panglima Laot megatakan bahwa :

“Barang bantuan tersebut dijual, dikarenakan ada anggota kelompok tersebut yang mempunyai boat sendiri. mereka menjual kembali bantuan yang diberikan. Karena sebagian nelayan mengajukan proposal secara pribadi”. (wawancara:15 Desember 2017)

Pernyataan di atas dapat dideskripsikan bahwa pengalokasian bantuan di aokasikan tidak tepat sasaran. Melainkan yang seharusnya orang yang tidak berhak mendapatkan bantuan, justru mereka mendapatkannya.

Dan penyataan bersamaan juga dijelaskan oleh Burhan selaku Nelayan Ujong Blang mengatakan bahwa :

“bantuan boat yang diberikan oleh pemerintah itu tidak teralokasikan dengan tepat. Karena sebagian besar yang mendapatkan bantuan tersebut

orang- orang yang memiliki boat dan penerima bantuan juga bukan nelayan yang memang membutuhkan bantuan tersebut, melainkan nelayan yang mempunyai boat”.(wawancara 14 Desember 2017)

Seperti yang disampaikan Tgk Basyir Husaini selaku Keuchik Gampong Ujong Blang beliau mengatakan bahwa :

“Selama ini bantuan dari pemerintah ada, namun keuchik hanya mengetahui ketika nelayan mengurus proposal ketika nelayan membutuhkan tand atangan keuchik, setelah itu apakah yang bersangkutan mendapatkan bantuan tersebut atau tidak keuchik tidak mengetahuinya lagi dikarenakan nelayan tidak mengatakan kepada keuchik dan pihak pemerintah pun tidak konfirmasi kepada keuchik bahwa memang ada bantuan yang disalurkan.”

Dari pernyataan diatas dapat dideskripsikan pengawasan dari pemerintah tidak dilaukan secara berkelanjutan kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan sehingga bantuan yang diberikan tidak merata dan ada sebagian nelayan bahkan tidak pernah mendapatkan bantuan sama sekali.

Abu Bakar selaku Nelayan Ujong Blang yang perna membeli barang Bantuan juga menyatakan :

“Selama ini saya belum pernah mendapatkan bantuan, namun saya perna membeli piber dari salah satu teman saya yang mendapatkan bantuan, dengan harga yang lebih murah”,(wawancara 1 Desember 2017)

Berdasarkan hasil yang didapatkan bahwa barang bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, tetapi dijadikan sebagai alat pemenuhan kebutuhan sesaat, dengan alasan bermacam- macam. Barang yang dijual sangatla murah yaitu setengah dari harga yang sebenarnya dipasaran disebabkan oleh penurunan pendapatan perekonomian masyarakat pesisir yang semain hari semakin rendah.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Strategi Pemerintah Kota Lhokseumawe Dalam Pembinaan Nelayan Pesisir

Berdasarkan hasil temuan dari lapangan menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan pemerintah selama ini lebih mengacu pada penyaluran bantuan dan setiap tahunnya selalu ada bantuan yang diberikan kepada masyarakat ujung blang yang berupa sarana dan prasarana untuk melaut. pemerintah melakukan strategi pembinaan nelayan yaitu diarahkan untuk mendayagunakan individu agar lebih mampu berperan didalam kelompok dan masyarakat global, ditengah- tengah ancaman yang dihadapi, baik dalam kehidupan pribadi, kelompok dan masyarakat global. Sebaliknya masyarakat untuk melihat peluang yang dikembangkan dilingkungan kelompok dan masyarakat global agar dapat dimanfaatkan bagi perbaikan kehidupan pribadi, kelompok dan masyarakat global.

Setiap kelompok nelayan bisa mengajukan permohonan ke Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian. Setelah bantuan diterima terkadang ada diadakannya penyuluhan jika diantara mereka yang kurang memahami kegunaan barang tersebut baru diadakannya. Tetapi jika bantuan yang mereka dapatkan berupa boat ataupun alat tangkap lainnya, itu tidak diadakannya pembinaan atau penyuluhan lagi pihak pemerintah menganggap bahwa mereka sudah lebih berpengalaman cara menggunakannya jadi tidak harus diadakannya penyuluhan atau pemberian arahan lagi. Pemberian bantuan dianggap sebagai upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kelompok masyarakat nelayan supaya mampu dalam kondisi tidak mampu dengan

mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari keterbelakangan yang terjadi sebelumnya.

proses peningkatan kemampuan kelompok, organisasi dan kelembagaan yang lain untuk memahami dan melaksanakan pembangunan dalam arti luas secara berkelanjutan. Ditinjau dari sisi ekonomi masyarakat Ujong Blang sangatlah membantu. Setiap barang bantuan yang sudah diberikan memiliki nilai ekonomi tersendiri, namun cara penggunaan mereka yang tidak tepat. Membuat bantuan ini hanya menambah pemasukan jangka pendek dan lebih banyak digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, tidak menambah penghasilannya dalam waktu jangka panjang.

pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat Ujong Blang adalah untuk membina dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat ujong blang. Dengan adanya barang bantuan tersebut dapat mempermudah nelayan ujong blang dalam menjalankan aktivitasnya sebagai nelayan. Selama ini tidak melakukan pengawasan dengan baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat leluasa melakukan penyelewengan terhadap bantuan yang diberikan.

Berdasarkan hasil yang didapatkan di lapangan menunjukkan bahwa dengan jumlah boat dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat Ujong blang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat ujong blang walaupun penguatan strategi pembinaan tidaklah merata. Melihat situasi nelayan di Ujong Blang berdasarkan observasi lapangan hal yang sangat penting dilakukan yaitu dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat nelayan kehadiran pemerintah di tengah- masyarakat yaitu hal yang terutama dengan mengubah mindset pola pikir

mereka dengan tidak beranggapan bahwa pembinaan dalam bentuk pendidikan itu penting guna untuk mengubah pola pikir mereka tentang arti pentingnya pembinaan nelayan pesisir agra menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang memiliki skill dan keterampilan di bidang perikanan dengan demikian akan terjadi perubahan- perubahan kearah yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan perekonomian dan kesejahteraan dengan beranggapan pentingnya strategi pembinaan agar dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat nelayan. Jika tidak dilakukan pendekatan terlebih dahulu, masyarakat sulit menerima perubahan dan bahkan akan menolak perubahan yang dilakukan oleh pemerintah.

4.2.1.1 Tindakan pemerintah Kota Lhokseumawe dalam melakukan pembinaan

Dari hasil wawancara dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pembinaan nelayan pesisir selama ini adalah tindakan pemerintah kota lhokseumawe dalam melakukan strategi pembinaan dengan mengutamakan penyaluran bantuan kepada masyarakat nelayan. Selama ini sudah banyak bantuan yang diberikan untuk kelompok nelayan Ujong Blang. Hasil bantuan yang diberikan berupa barang bukan finansial jenis bantuan tersebut diberikan bebeda- beda karena barang bantuan yang diberikan sesuai dengan perminta/ permohonan masyarakat. Adapun bantuan yang diberikan adalah boat, alat tangkap, piber, mesin boat dan lain- lain yang merupakan alat tangkap atau kebutuhan para nelayan dan setiap tahun selalu ada bantuan yang diberikan untuk masyarakat ujong blang.

Berdasarkan hasil didapatkan di lapangan menunjukkan bahwa setiap tahun Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian selalu memberikan bantuan kepada di ujung blang, walaupun bantuan yang diberikan tidak terdata secara detail namun setiap kelompok masyarakat menerima bantuan sudah melakukan perjanjian yang bahwa barang diberikan tidak boleh dipindah tangankan orang lain atau dijual.

Dengan adanya bantuan- bantuan tersebut yang diberikan diharapkan mampu membangun dirinya secara baik dan memperbaiki kehidupannya sehingga masyarakat dapat meningkatkan harkat dan martabat dengan mengandalkan kekuatan tangannya sendiri dan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan dengan adanya bantuan tersebut.

4.2.1.2 Proses strategi pembinaan nelayan pesisir kota Lhokseumawe

Dari hasil wawancara dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pembinaan nelayan pesisir selama ini melalui proses strategi pembinaan nelayan pesisir kota lhokseumawe dalam melakukan strategi pembinaan dengan mengutamakan penyaluran bantuan kepada masyarakat nelayan. Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembinaan masyarakat, strategi yang dilakukan pada dasarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengedepankan fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam mengelola program/ kegiatan pembinaan masyarakat.
2. Mengembangkan komunikasi, konsultasi dan diskusi publik dalam menjanging aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan.

3. Membangun kemitraan dengan seluruh pelaku pembangunan untuk secara sinergis melakukan upaya bersama dalam rangka pembinaan masyarakat.
4. Memotivasi tokoh- tokoh masyarakat, baik yang berada diarah maupun di rantau untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program- program pembinaan masyarakat
5. Mengembangkan komunikasi, konsultasi dan koordinasi
6. Mengutamakan peran serta masyarakat dari pada masyarakat
7. Mengembangkan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan pusat, kabupaten dan kota dalam menetapkan program- program pembinaan nelayan.

Dan proses yang pemerintah lakukan selama ini untuk masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan yaitu terlebih dahulu mengajukan proposal dan melengkapi persyaratan- persyaratan berupa berkas dan membentuk kelompok dengan beranggota 10 orang. Setelah itu barulah diajukan ke Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian. Namun karena kurangnya pengawasan dari pemerintah sehingga mengakibatkan sebagian nelayan yang menyalahgunakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dengan cara menjual kepada orang lain dengan harga yang murah dan tidak dipergunakan sebaik mungkin.

4.2.1.3 Perencanaan Strategi Pembinaan Nelayan Pesisir Kota Lhokseumawe

Dalam strategi pembinaan nelayan membutuhkan perencanaan yang matang sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Dan pemerintah juga

melakukan berbagai pendekatan kepada masyarakat mengenai apa yang masyarakat nelayan butuhkan dalam kegiatan melaut. Namun disini terkadang perencanaan yang telah disusun secara sistematis tidaklah terlaksana semestinya dikarenakan ada berbagai faktor yang terjadi dilapangan bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah yang sehingga bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran bahkan kebanyakan dari nelayan yang mendapatkan bantuan tersebut seharusnya tidak berhak menerima karena bisa dikatakan yang bersangkutan bukan bermata pencaharian tetap. Hanya menumpang nama saja di saat pembuatan proposal. Jadi dalam hal ini pemerintah dalam pembuatan proses strategi pembinaan kepada nelayan harus membuat perencanaan sematangmatangnya agar setelah bantuan disalurkan dapat evaluasi kembali dan ukur apakah bantuan yang disalurkan itu tepat sasaran dan dipergunakan dengan baik. Kegiatan strategi pembinaan masyarakat nelayan yang tidak diikuti dengan pendampingan secara berkelanjutan. Kegiatan program pemerintah juga masih banyak yang mencakup pada pencapaian pelaksanaan yang tidak disertai penguatan bobot proses pembinaan yang berkelanjutan.

Kegiatan program pemerintah juga masih banyak yang mencakup pada pencapaian pelaksanaan yang tidak disertai penguatan bobot proses pembinaan yang berkelanjutan.

Strategi pembinaan masyarakat nelayan membutuhkan pendekatan tahapan perubahan sosial yang membutuhkan waktu yang lama, untuk itu program strategi pembinaan masyarakat nelayan dilakukan dengan tahapan yang disusun dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis dapatkan tentang strategi pemerintah dalam pembinaan nelayan pesisir , dapat disimpulkan bahwa :

1. Strategi pemerintah dalam membina nelayan melalui program- program yang ada seperti :
 - a. Adanya Program- program bantuan yang diberikan pemerintah melalui Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian. Tindakan Pemerintah selama ini dalam strategi pembinaan pemerintah memfasilitasi nelayan melalui program- program bantuan, adapun program tersebut berupa alat tangkap misalnya boat, jaring pukat, mesin boat, piber. Dengan adanya Program bantuan tersebut diharapkan kepada nelayan kondisi kehidupan masyarakat nelayan lebih sejahtera serta memudahkan mereka dalam melakukan kegiatan melaut, dan juga lebih maju, baik dari segi kualitas sosial masyarakat. Strategi pembinaan dari pemerintah untuk nelayan yaitu berupa bantuan yang diberikan bukan berupa uang atau finansial.
 - b. Proses yang dilakukan pemerintah setiap masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan terlebih dahulu harus mempersiapkan berkas- berkas sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan

atau membuat proposal atas nama kelompok terlebih dahulu serta melampirkan berkas- berkas yang diperlukan. setelah bantuan tersebut tersalurkan barulah pihak dari pemerintah memberikan arahan atau penyuluhan terkaid tentang pembinaan atau memberikan arahan- arahan yang berhubungan dengan bantuan yang mereka dapatkan melalui kelompok- kelompok yang mengajukan proposal bantuan tersebut.

- c. Perencanaan pemerintah yaitu sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh nelayan dan berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Wali Kota.

Tujuannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan pemerintah memberikan pembinaan melalui bantuan- bantuan dan program- program agar masyarakat nelayan mampu bekerja dengan baik setelah mendapatkan bantuan. Dan setelah diberikan bantuan masyarakat nelayan harus bisa bertanggung jawab apa yang sudah diberikan.

Kendala Dinas Kelautan Dan Perikanan dan Pertanian Dalam Pembinaan Nelayan Ujong Blang yaitu kendala yang bersifat eksternal maupun internal, yaitu sebagai berikut :

- a. Kendala Ekternal:

Masyarakat Ujong Blang yang tidak memanfaatkan barang bantuan sebaik mungkin, melainkan barang bantuan yang pemerintah berikan kepada nelayan dijual dengan harga yang lebih murah.

b. Kendala Ikternal :

Kurangnya Pengawasan dari pihak pemerintah khususnya pada Dinas Kelautan, perikanan dan Pertanian yang ketika pengalokasian bantuan itu tidak tepat sasaran yang sehingga yang mendapatkan bantuan itu bukan orang yang lebih membutuhkan melainkan orang yang sudah pernah mendapatkan bantuan dan orang yang sudah mempunyai boat contohnya mendapatkan boat lagi yang sehingga membuat masyarakat seenaknya saja melakukan aksi jual beli barang berasal dari bantuan diberikan kepadanya. Bantuan yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Hal ini terjadi karena Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian tidak memiliki tim khusus dalam hal pengawasan.

5.2 Saran

- a. Kepada pemerintah kota Lhokseumawe mengenai Tindakannya selama ini memang sangat baik tapi disini seharusnya pemerintah jangan hanya memberikan bantuan saja namun juga adanya pengawasan dari pemerintah setelah bantuan diberikan guna agar masyarakat tidak menyalahgunakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan selain bantuan juga adanya pelatihan khusus untuk nelayan karena dengan adanya pelatihan akan menciptakan SDM yang berkualitas maka dari itu pelatihan sangat diperlukan dengan begitu masyarakat nelayan bisa mengembangkan potensi yang

dimiliki dengan mengolah ikan tersebut menjadi erbagai olahan makanan.

- b. Dan proses pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sebaiknya pemerintah harus menserve terlebih dahulu sebelum bantuan di salurkan guna nelayan yang mendapatkan bantuan itu nelayan yang memang berhak mendapatkan .
- c. Perencanaan pemerintah seharusnya dalam pembinaan nelayan harus memahami betul keadaan masyarakat nelayan dengan masalah-masalah yang dihadapi dan potensi serta peluang yang ditemukan di lingkungan pekerjaannya sendiri sehingga mudah dipahami dan diingat oleh nelayan. Dan strategi pembinaan masyarakat nelayan membutuhkan tahapan perubahan sosial, suatu rencana yang menyeluruh terpadu dan menyatu dibidang pembinaan yang diberikan pandangan tentang kegiatan yang akan dijalankan, untuk mencapai tujuan pembinaan yang optimal. Dan pemerintah harus menyediakan tim pengawas khusus agar semua masyarakat nelayan dapat merasakan sama rata bantuan dari pemerinta dan bagi yang sudah mendapatkan tidak senyalahgunakan.

Kendala Dinas Kelautan Dan Perikanan dan Pertanian Dalam Pembinaan Nelayan Ujong Blang yaitu kendala yang bersifat eksternal maupun internal, yaitu sebagai berikut :

a. Kendala Ekternal:

Kepada Masyarakat Nelayan Gampong Ujong Blang seharusnya mempergunakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dengan sebaik mungkin dan tidak menjadikan bantuan sebagai suatu ketergantungan. Dan jadikan bantuan yang diberikan pemerintah berupa alat untuk melaut sebagai sarana dan prasarana untuk memudahkan aktivitas masyarakat untuk mencari sumber penghasilan.

c. Kendala Ikternal :

Kepada pemerintah agar melakukan pengawasan sebaik mungkin agar masyarakat tidak menyalahgunakan dan pengawasan terhadap harga pasar yaitu harga beli dan harga yang dipasarkan harus sesuai, guna supaya harga ikan yang dibeli sama nelayan sama dengan harga yang di pasarkan tidak lebih mahal.